



31.649 PENERIMA PKH TERINDIKASI JUDOL



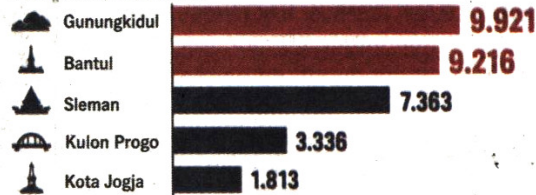
dari **178.402**
penerima manfaat
di DIJ



Data indikasi
berasal dari
PPATK melalui
Kemensos

PENERIMA PKH TERINDIKASI JUDOL

Menurut wilayah penerima



TERINDIKASI BUKAN BERARTI TERBUKTI

Penerima dapat mengajukan sanggah jika merasa tidak melakukan judol.

31.649 Penerima Bansos di DIJ Terindikasi Judol

Terbanyak di Gunungkidul,
Paling Sedikit Kota Jogja

JOGJA - Sebanyak 31.649 penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di DIJ terindikasi judi online (judol). Dinas Sosial (Dinsos) DIJ mencatat wilayah dengan jumlah penerima bansos terindikasi judol terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Dinsos DIJ Suyarno mengatakan, Kota Jogja menjadi wilayah dengan jumlah penerima PKH terindikasi judol paling sedikit, yakni 1.813 penerima ■

Baca **31.649...** Hal 7



Jadi ada 17,74 persen yang terindikasi judol dari jumlah data 178.402 penerima manfaat.”



CINTIA YULIANI/RADAR JOGJA

Suyarno
Kepala Dinsos DIJ

31.649 Penerima Bansos di DIJ Terindikasi Judol

Sambungan dari hal 1

"Jadi ada 17,74 persen yang terindikasi judol dari jumlah data 178.402 penerima manfaat," jelasnya saat dikonfirmasi, kemarin (1/9).

Artinya, sebanyak 17,74 persen penerima PKH itu saat ini dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial. Namun, menurut Suyarno, data tersebut belum tentu menunjukkan penerima benar-benar melakukan judi online. Sebab, ada kemungkinan telepon seluler (HP) milik penerima pernah dipinjam atau digunakan oleh orang lain untuk disalahgunakan.

"Ternyata untuk main judol, itu *kan* terkoneksi dengan rekening penerimaan bantuan sosial itu,"

tuturnya.

Oleh karena itu, penerima yang merasa tidak melakukan judi online dapat mengajukan sanggah dengan menyertakan bukti-bukti pendukung serta meminta surat keterangan dari keluarga. Nantinya, pendamping PKH akan melakukan klarifikasi untuk memastikan apakah penerima benar terindikasi judol atau tidak.

"Dampaknya ketika terindikasi memang bantuannya terpending," katanya. Bagi penerima PKH yang membutuhkan bantuan dalam proses itu, pendamping PKH juga siap membantu.

Data penerima yang terindikasi judol tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang

disampaikan melalui kementerian sosial (Kemensos). Saat ini, Dinsos DIJ masih meminta data secara *by name* karena baru terdapat data dalam bentuk agregat.

Pihaknya mengimbau, warga penerima PKH agar lebih berhati-hati dalam menjaga nomor telepon serta dokumen kependudukan. KTP maupun kartu keluarga, sebaiknya tidak dipinjamkan kepada orang lain meski memiliki hubungan dekat. "Karena tadi bisa disalahgunakan. Terdampaknya adalah si penerima PKH itu," tegasnya.

Dia juga meminta masyarakat menjaga telepon seluler yang digunakan dan tidak sembarangan memberikan akses orang lain. (cin/laz /by/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005